KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Didesak Tuntaskan RUU PPRT sebelum 2024
Tanggal : Senin, 13 Februari 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

DPR Didesak Tuntaskan RUU PPRT sebelum 2024

Dibutuhkan regulasi berbentuk undang-undang untuk mendorong kondisi HAM yang kondusif bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga.

RIZKI NAZIAH
redaksi@mediaindonesia.com

MENJELANG Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Nasional pada 15 Februari mendatang, desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang oleh DPR menguat sebelum masa sidang berakhir. "Ini momentum yang penting, selain masa sidang yang segera berakhir, pada 15 Februari 2023 adalah Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro di Jakarta, kemarin.

Sepanjang 2017- 2022, JALA PRT mendokumentasikan setidaknya terdapat 2.637 kasus kekerasan terhadap PRT, seperti kekerasan ekonomi (tidak digaji, dipotong agen semena- mena), kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual.

Komnas HAM, kata Atnike, juga kerap menerima pengaduan kasus PRT yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia, antara lain gaji tidak dibayar, hilang kontak, kekerasan, perdagangan orang, dan kekerasan seksual.

"Pekerja rumah tangga merupakan salah satu kelompok marginal atau kelompok rentan yang kasus-kasusnya juga banyak diadukan ke Komnas HAM. Yang merefleksikan pekerjaan rumah tangga itu terjadi karena mereka tidak mendapatkan status yang resmi sebagai pekerja rumah tangga sehingga hak-hak mereka sebagai seorang pekerja kerap diabaikan oleh pemberi kerja," imbuhnya.

Komnas HAM pada 2021 telah melakukan pengkajian dan penelitian tentang pekerjaan yang layak bagi PRT dan urgensi pengesahan RUU PPRT sebagai undang-undang. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Komnas HAM berkesimpulan antara lain bahwa untuk dapat mendorong kondisi HAM yang kondusif bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak PRT dibutuhkan regulasi yang melindungi dalam bentuk undang-undang.

Ketuk palu

Menko Polhukam Mahfud MD meminta RUU PPRT segera disahkan sebelum 2024. "Undang-undang PPRT merupakan utang pemerintah kepada para pekerja rumah tangga. Jadi RUU PPRT ini harus disahkan sebelum tahun 2024," terang Mahfud.

Ia mengatakan pemerintah masih menunggu DPR untuk membahas RUU PPRT. Menurut Mahfud, pemerintah sudah siap jika DPR membahas hal tersebut.

Senada, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan pemerintah siap menyambut RUU PPRT menjadi RUU inisiatif DPR RI. Menaker mengatakan pemerintah telah beberapa kali menggelar *focus group discussion* (FGD) tentang RUU PPRT, baik FGD di internal maupun dengan *stakeholder*. "Begitu RUU ini selesai menjadi RUU inisiatif DPR, maka pemerintah sudah siap. Posisi pemerintah benar-benar sudah siap karena pemerintah telah mendiskusikannya," kata dia.

Di lain pihak, anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mengatakan RUU tersebut hanya tinggal diketuk palu dalam Rapat Paripurna DPR. Menurut Irma, Presiden Joko Widodo pun sudah meminta RUU ini untuk segera disahkan.

"RUU ini tinggal disahkan di rapat paripurna dan Presiden pun sudah minta DPR segera mengesahkan. Harusnya DPR sebagai wakil rakyat lebih memiliki keberpihakan kepada rakyat. Bukannya malah menunda-nunda," cetus Irma saat dihubungi, kemarin. (Ami/Fik/MGN/Ant/H-3)